

KAJIAN HISTORIS KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA**Hendriane Namotemo, S.S., M.M¹, Andre Demitrius, S.IP., MA²**

¹Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Hein Namotemo, Jl. Kawasan Pemerintahan Tobelo, 97762
E-mail: en_aloisa@yahoo.com

²Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo, Jl. Kawasan Pemerintahan Tobelo, 97762
E-mail: andredemitrius@ymail.com

ABSTRAK

Adanya kesenjangan dalam penelitian terhadap organisasi masyarakat terutama dalam dekade terakhir menghasilkan kesenjangan dalam memahami perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia. Studi terhadap organisasi masyarakat sempat mendapat banyak perhatian di masa transisi Indonesia pada tahun 1990-2000an, tetapi kemudian mengalami jeda dan menghasilkan kesenjangan dalam mengikuti perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia dari masa ke masa sehingga saat ini. Sejak Indonesia memasuki pintu reformasi, keterbukaan dari pemerintah terhadap hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat, mendorong jumlah organisasi masyarakat bertumbuh pesat dan menjamur. Saat ini organisasi masyarakat telah menjadi salah satu barisan terdepan sebagai penyedia layanan ke masyarakat, tetapi studi terhadap organisasi masyarakat seolah tertinggal dari perkembangan tersebut. Menanggapi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia dengan melakukan kajian narasi historis pada beberapa artikel internasional untuk memahami kemunculan dan berkembangnya serta berbagai factor yang membentuk konteks organisasi masyarakat di Indonesia sejak era Pra kemerdekaan, Paska kemerdekaan, Orde Baru hingga Reformasi.

Kata kunci : *kajian historis, organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, foundation*

ABSTRACT

The scarce studies of mass organizations in Indonesia, particularly within the last decade have resulted in gaps in the understanding of the development of mass organizations in Indonesia. Studies of Indonesian mass organizations had received much attention during Indonesia's transition on the 1990-2000s, while the literature on the latter period is rarely found. This paucity raised gaps in the understanding of the development of mass organizations in Indonesia, on the other hand, within the same period, the number of mass organizations have grown rapidly. In response to these gaps, this study aims to describe the development of community organizations in Indonesia by conducting a historical narrative review on selected international articles and investigating the emergence and development of community organizations in Indonesia through four different eras, include the Pre-independence era, the Independence era, the New Order era and the Reformation era. Explanations related to factors that significantly influence the emergence and development of mass organizations will also be presented in this paper.

Keywords : *Historical narrative review, mass organization, non-profit organization, yayasan*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970an organisasi masyarakat muncul dan berkembang pesat baik di negara maju dan negara berkembang baik dalam jumlah, ukuran dan cakupan misi (Clarke, 1998; Hadiwinata, 2003; Salamon, 1994). Peningkatan ini menjadikan organisasi masyarakat memegang peran penting

dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di berbagai negara (Clarke, 1998; Hadiwinata, 2003; Lynn, 2003; Salamon, 1994). Perkembangan ini juga membuat akademisi internasional memberi perhatian dalam studi organisasi masyarakat dalam tiga dekade terakhir (Salamon, 1994).

Di Indonesia peranan organisasi masyarakat juga mendapat pengakuan terutama terhadap partisipasi organisasi masyarakat dalam menanggapi berbagai isu sosial dan politik seperti demokrasi, *good governance*, perlindungan hak asasi, advokasi, pembangunan, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan hidup (Ahsan & Nurmayanti, 2016; Aspinall, 2011; Eldridge, 2005; Gayo, 2012; Hadiwinata, 2003; Lay, 2017). Kemunculan dan perkembangan organisasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik dimana organisasi tersebut berada (Anheier, 2014; Kenny, 2013). Karena itu, untuk memahami perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia penting untuk melihat konteks politik dan kebijakan yang turut membentuk organisasi masyarakat di Indonesia (Eldridge, 2005). Kajian historis ini juga akan memaparkan aspek-aspek yang signifikan mempengaruhi perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia. Pemaparan mengenai definisi organisasi masyarakat akan dipaparkan mendahului pembahasan historis kemunculan dan perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia.

2. Definisi Organisasi masyarakat dalam konteks internasional

Organisasi masyarakat dapat mengacu pada berbagai definisi dan istilah yang berbeda. Dalam konteks internasional dikenal beberapa istilah yang sering digunakan seperti *non-governmental organization* (NGO), *community-based organization* (CBO), *voluntary organization* (organisasi relawan), *civil society organization* (CSO) yayasan, atau asosiasi. Dalam memahami berbagai istilah yang digunakan pada organisasi masyarakat penting untuk memahami konteks yang melatar belakangi munculnya berbagai istilah tersebut. Di Inggris, organisasi masyarakat diasosiasikan dengan organisasi relawan dikarenakan kemunculan organisasi tersebut yang bersifat sukarela (Kenny, 2013). Istilah *voluntary* atau sukarela menekankan aspek kebebasan memilih dari individu yang terlibat dalam organisasi masyarakat (Kenny, 2013). Namun, istilah ini lebih tepat untuk menggambarkan salah satu bentuk dari organisasi masyarakat dan tidak dapat dipakai untuk mengacu pada semua jenis organisasi masyarakat dikarenakan beberapa jenis organisasi masyarakat memiliki pegawai terikat dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung operasi organisasi. Di masa Perang Dunia kedua, muncul berbagai organisasi yang berorientasi pada pengembangan manusia, pada masa inilah istilah *non-governmental organization* (NGO) berkembang (Lewis & Kanji, 2009). Organisasi yang muncul saat itu mempromosikan pembangunan dan bersifat independen dari campur tangan pemerintah (Lewis & Kanji, 2009). Seiring perkembangan waktu, istilah NGO yang sering diidentikan dengan kemandirian dari inisiatif pemerintah tidak dapat digunakan untuk

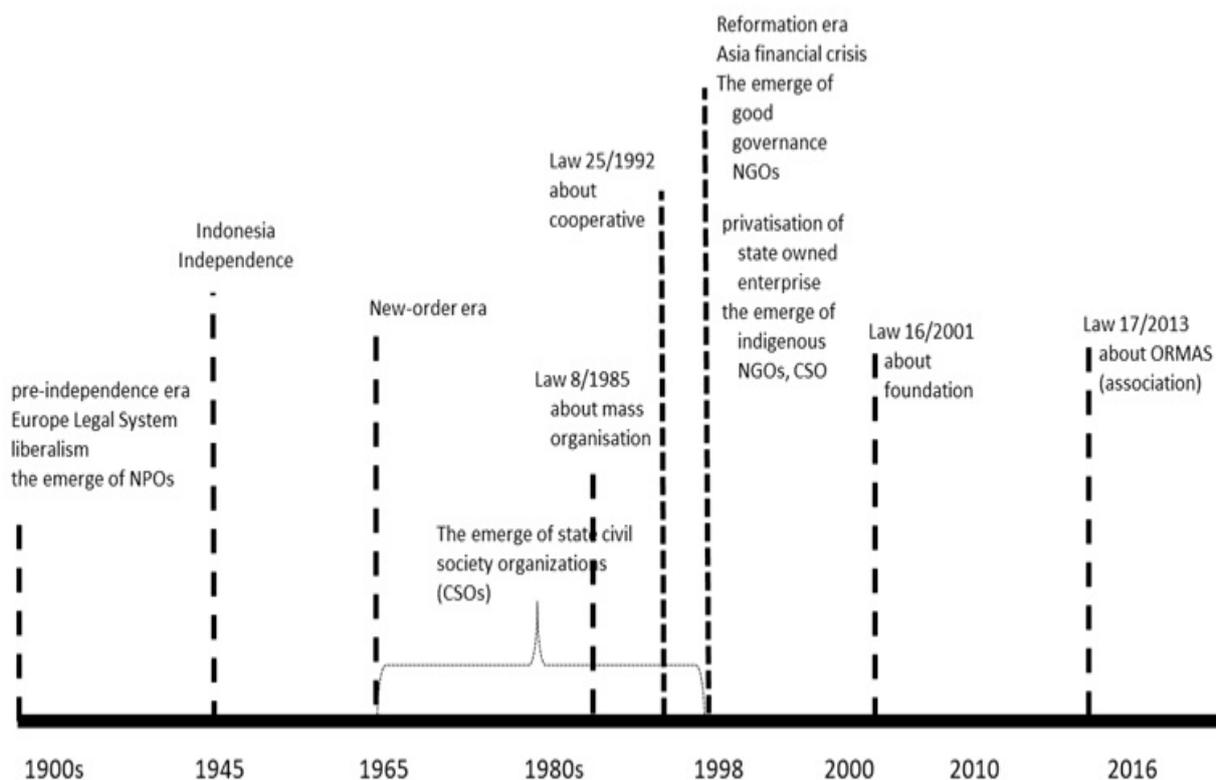
mewakili seluruh organisasi masyarakat di berbagai negara dikarenakan perbedaan konteks hukum dimana di negara-negara tertentu pemerintah juga dapat mendirikan organisasi masyarakat terutama dalam melayani kepentingan umum warga negaranya seperti layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk di Indonesia. Istilah lainnya yang juga digunakan dalam organisasi masyarakat yaitu *civil-society organization* (CSO) dimana istilah ini diasosiasikan kepada berbagai organisasi yang aktif dalam memperjuangkan emansipasi politik (Edward in Kenny, 2013). Istilah ini juga terbatas dalam mendefinisikan keragaman organisasi masyarakat dikarenakan beberapa jenis organisasi masyarakat sedikit sekali melibatkan diri dalam aktivitas politik dan mengutamakan pelayanan sosial seperti organisasi masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.

Keragaman bentuk dan konteks organisasi masyarakat yang beragam di berbagai negara menjadikan definisi organisasi masyarakat masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Salah satu definisi terhadap organisasi masyarakat di usulkan oleh beberapa peneliti di sektor ketiga seperti Salamon dan Anheier (1992, 1998) dan Salamon dan Sokolowski (2016). Dalam studi mereka terhadap berbagai istilah dan konsep yang digunakan di berbagai negara terhadap organisasi masyarakat menghasilkan deskripsi terhadap organisasi masyarakat dengan mengacu pada ciri organisasi masyarakat yaitu *formal*, *swasta*, *kepentingan umum*, *non-profit* atau *nirlaba*, *independen* dan *sukarela*. *Formal* berarti organisasi masyarakat haruslah memiliki badan hukum, terdaftar secara resmi dan memiliki struktur organisasi. Ciri ini membedakan organisasi masyarakat dari sebuah pergerakan, aktivitas sukarela atau perkumpulan. *Swasta* menunjuk pada ciri organisasi masyarakat yang merupakan hasil inisiatif dari masyarakat dan bukan pemerintah. *Kepentingan umum* mengacu pada tujuan organisasi masyarakat yang selalu ditujukan untuk melayani kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu seperti pendiri organisasi atau pemilik organisasi. *Nirlaba* berarti organisasi tidak mendistribusikan profit yang diperoleh dalam jumlah yang signifikan kepada manajemen atau pemilik organisasi, melainkan digunakan kembali bagi pencapaian misi organisasi. Ciri ini membedakan organisasi masyarakat dari organisasi bisnis yang berorientasi profit. *Sukarela* berarti keikutsertaan dalam organisasi atau pencapaian misi bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Deskripsi ini diterima luas dan kemudian banyak digunakan peneliti di sektor ketiga (sektor non pemerintah dan non bisnis) di berbagai negara (Kenny, 2013). Dengan mengacu pada deskripsi di atas, organisasi masyarakat dalam kajian ini didefinisikan sebagai organisasi yang berciri formal, swasta, melayani kepentingan umum, mandiri dan bersifat sukarela.

3. PEMBAHASAN

Kemunculan dan berkembangnya organisasi masyarakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kebijakan di Indonesia. Untuk memahami faktor-faktor yang memicu kemunculan serta membentuk organisasi masyarakat di Indonesia perlu dikaitkan dengan konteks politik dan sosial di Indonesia yang akan dipaparkan berdasarkan konteks

sejarah Indonesia yang melalui beberapa periode transisi serta peristiwa penting yang turut membentuk perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 1. Periode perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia selanjutnya akan dipaparkan dalam empat periode utama yaitu era Pra kemerdekaan (1500an-1945), Kemerdekaan (1945-1966), Orde Baru (1966-1998) dan Reformasi (1998- sekarang).



Gambar 1. Perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia dalam berbagai periode. Sumber: Eldridge (1989, 2005); Fakhri (1991); Hadiwinata (2003); Nugroho (2012); Riker (1999); Setiyono and McLeod (2010)

3.1. Era Pra Kemerdekaan (1500-1945)

Indonesia mengalami sejarah panjang kolonisasi dari Belanda selama hampir 300 tahun (1596-1942) dan tiga setengah tahun kolonisasi Jepang (1942-1945) sebelum meraih kemerdekaan di tahun 1945. Kolonisasi Belanda menjadikan perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia pada era kolonial banyak dipengaruhi oleh kebijakan Belanda saat itu (Antlöv, Ibrahim, & van Tuijl, 2006; Idris & Hati, 2013). Undang-undang pertama yang mengatur tentang organisasi masyarakat di Indonesia diterbitkan pada tahun 1870 dibawah sistem hukum Eropa dan berdasarkan Undang-undang tersebut, Yayasan dan Asosiasi didefinisikan sebagai organisasi non-anggota (Antlöv et al., 2006).

Bentuk dan kegiatan organisasi sosial pada saat

itu seperti komunitas agama, sekolah swasta, asosiasi kredit dan beberapa perhimpunan lainnya (Antlöv et al., 2006; Fakhri, 1991). Pada tahun 1910-1930an bangsa Indonesia memasuki masa kebangkitan politik yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang aktif membangun kesadaran politik, nilai-nilai dan keyakinan (Antlöv et al., 2006; Riker, 1999). Menurut beberapa peneliti setidaknya terdapat tiga pendorong utama munculnya organisasi masyarakat saat itu yaitu pertama adanya upaya pemberdayaan pendidikan dan ekonomi, kedua pengaruh Islam dan ketiga kepemimpinan para aristokrat (Idris & Hati, 2013)

Pada jaman kolonial, penduduk asli Indonesia sulit mendapatkan akses untuk menggunakan sumber daya bagi mereka sendiri (Idris & Hati, 2013). Penduduk lokal kehilangan kontrol dan hak mereka dalam

politik, ekonomi, sosial dan kehidupan keagamaan. Kemunculan organisasi masyarakat pada saat itu memfasilitasi penduduk lokal untuk menjalankan keyakinan, nilai dan sistem yang mereka yakini, berbagai organisasi tersebut juga mengupayakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Idris & Hati, 2013). Pada saat itu, sebagian besar organisasi masyarakat muncul di Jawa dan hal ini merupakan akibat dari kontribusi para *santri* dan *priyayi* atau aristokrat lokal yang berpengaruh di Jawa (Idris & Hati, 2013). Para *santri* sebagai cendekiawan agama mendorong pengajaran Islam untuk turut memajukan kemandirian ekonomi dengan membangun jaringan berbagai kelompok dengan perdagangan (Candland, 2000; Idris & Hati, 2013). Kontribusi penting juga diberikan oleh para *priyayi* sebagai kalangan terpandang pada saat itu mereka menggunakan status, harta, pengetahuan serta jaringan yang mereka miliki untuk mendukung berbagai operasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok pada masa kolonial (Idris & Hati, 2013; Riker, 1999). Organisasi masyarakat pada era ini bukan saja secara aktif mengupayakan pemberdayaan sosial, ekonomi dan pendidikan tetapi juga menjadi kendaraan bagi penduduk lokal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Idris & Hati, 2013; Riker, 1999). Kontribusi yang signifikan dari gerakan sipil tersebut juga di akui dan dipaparkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013.

3.2. Era Kemerdekaan (1945-1965)

Era ini dimulai dengan peristiwa deklarasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pergerakan kelompok sipil pada saat ini didominasi oleh para buruh dan partai politik yang muncul setelah kemerdekaan (Riker, 1999). Pada tahun 1957 Sukarno, sebagai presiden pertama Indonesia memperkenalkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan meningkatkan kendali serta membatasi aktivitas kelompok sosial terutama kelompok yang menentang pemerintahannya (Riker, 1999). Pada periode ini jumlah organisasi masyarakat tetap bertambah, namun aktivitas dan pergerakan mereka dibatasi secara politik (Riker, 1999). Era ini kemudian diwarnai dengan adanya ketidakstabilan politik, inflasi tiga digit dan konflik militer yang menghentikan keberlanjutan demokrasi terpimpin pada tahun 1965 (Pratono & Sutanti, 2016).

3.3. Era Orde Baru (1965-1998)

Pemulaan era Orde Baru ditandai dengan pemerintahan Presiden Soeharto yang kemudian memimpin Indonesia selama tiga dekade yaitu sejak tahun 1965-1998. Pemerintah pada masa ini memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kebebasan pers, partai politik dan organisasi masyarakat (Pratono & Sutanti, 2016). Melalui Undang-undang Nomor 8

tahun 1985 tentang organisasi masyarakat, pemerintah saat ini membubarkan berbagai organisasi masyarakat yang menunjukkan oposisi kepada negara (Pratono & Sutanti, 2016). Dalam periode ini Presiden mengendalikan hampir semua organisasi masyarakat (Pratono & Sutanti, 2016; Riker, 1999). Pemerintah saat itu hanya mengizinkan pembentukan koperasi dan mendorong organisasi masyarakat untuk mendaftar dan membentuk koperasi. Meski demikian pemerintah tetap mengendalikan dan mengatur seluruh koperasi untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan swasembada pangan (Eldridge, 1989, 2005; Nugroho, 2012).

Pada masa ini juga, Indonesia memasuki kebijakan "liberal kapitalis" di tahun 1967-1980an. Dalam tahun 1967-1980an muncul berbagai organisasi masyarakat atau NGO yang berorientasi pembangunan. Kemunculan NGO di Indonesia merupakan tanggapan terhadap kegagalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menjalankan pembangunan (Antlöv et al., 2006; Fakhri, 1991; Nugroho, 2010; Riker, 1999). Berbagai NGO pada saat itu memiliki misi pembangunan melalui berbagai aktivitas pengembangan masyarakat seperti layanan kesehatan, pemberian nutrisi, air bersih, sanitasi, perencanaan keluarga, pendidikan non formal, teknologi terapan dan koperasi (Eldridge, 2005; Nugroho, 2010). Pada akhir 1980an organisasi sipil yang dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah seperti asosiasi petani, buruh, perempuan, nelayan dan kelompok lainnya muncul dan berkembang (Antlöv et al., 2006). Berbagai organisasi masyarakat bentuk pemerintah ini di atur oleh pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah (Antlöv et al., 2006). Pada tahun 1990an kritik terhadap pemerintah dan organisasi masyarakat bentuk pemerintah bermunculan, kritik terutama diberikan terhadap hirarki, birokrasi, kooptasi serta tidak adanya transparansi dalam penggunaan bantuan pemerintah oleh organisasi-organisasi tersebut (Antlöv et al., 2006). Menghadapi kritik dari berbagai NGO pada saat itu, pemerintah menjalankan kampanye hitam terhadap NGO dengan mengasosiasikan NGO sebagai lembaga anti pemerintah (Eldridge, 1989, 2005; Fakhri, 1991; Sakai, 2002). Meski ditengah pembatasan ketat oleh pemerintah, serta keberpihakan pemerintah pada organisasi pro pemerintah, berbagai NGO tetap bermunculan dan tetap bertumbuh melalui periode tersebut. Berbagai organisasi masyarakat yang berhasil bertahan melalui periode tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pertama, organisasi masyarakat yang muncul memilih untuk tidak secara eksplisit menentang pemerintah namun memilih untuk beraliansi dengan pemerintah dengan mengadopsi program pembangunan pemerintah dan memilih bentuk organisasi selain NGO yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (Eldridge, 1989). Kedua, kontribusi dari berbagai organisasi masyarakat yang disponsori oleh lembaga donor internasional baik secara politis maupun finansial menjadikan pemerintah

tetap memberi ruang bagi organisasi masyarakat untuk beroperasi pada saat itu (Antlöv et al., 2006).

4. Era Reformasi (1998-saat ini)

Setelah turunnya Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1998, berbagai organisasi masyarakat menjamur di Indonesia. Berbagai organisasi ini juga berkolaborasi bersama pemerintah dan organisasi internasional dalam menangani berbagai isu sosial serta mengawal transisi pemerintahan menuju pemerintahan yang demokratis (Riker, 1999). Organisasi masyarakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menginisiasi serta mempertahankan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kontribusi organisasi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal yaitu: pertama, organisasi masyarakat bersama-sama masyarakat sipil memberikan tekanan untuk menghentikan pemerintahan Orde Baru (Antlöv et al., 2010). Kedua, organisasi masyarakat pada saat itu sangat aktif dalam membangun kesadaran akan kedaulatan rakyat di akar rumput, sehingga ketika terjadi transisi politik di tahun 1998, populasi akar rumput secara spontan memberi dukungan dan memperjuangkan kedaulatan rakyat bersama (Hadiwinata, 2003). Pada periode ini muncul berbagai organisasi masyarakat yang memberi perhatian terhadap *good governance*. Berbagai NGO terbentuk dan mengawasi hampir semua perangkat pemerintahan di Indonesia seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), *Parliament/legislative Watch* (DPR-Watch), *Government Watch* (GOWA), *Police Watch* (PolWatch) dan Pengawasan Anggaran (FITRA) (Antlöv et al., 2006).

Jumlah organisasi masyarakat meningkat tajam setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto (Antlöv et al., 2010). Jumlah organisasi masyarakat di Indonesia kemudian bertumbuh dari sekitar 6,000-7,000 pada pertengahan tahun 1990an menjadi 254,633 di tahun 2016 (Indonesia, 2016; Kobayashi, 2011). Peningkatan jumlah organisasi masyarakat ini disebabkan adanya keterbukaan dari pemerintah terhadap sektor ketiga serta berakhirnya propaganda pemerintah terhadap ormas terutama NGO sebagai organisasi 'anti pemerintah'. Keterbukaan pemerintah ini memperluas ruang gerak organisasi masyarakat yang kemudian muncul di beragam bidang seperti keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Palmer, 2014; Schweizer, Dupuis, & Buren, 2016). Dalam periode ini, organisasi masyarakat di Indonesia tidak lagi berfokus menjadi oposisi pemerintah melainkan menjadi mitra pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial di masyarakat (Palmer, 2014; Schweizer et al., 2016). Pemerintah juga mulai mendorong pemberlakuan transparansi dan akuntabilitas di organisasi masyarakat dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 yang secara eksplisit mencantumkan pemberlakuan untuk mengumumkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik di

surat kabar oleh Yayasan atau organisasi masyarakat yang menerima dana senilai lima ratus juta rupiah atau lebih dan memiliki aset senilai atau melebihi 20 miliar (Antlöv et al., 2006).

Meski era ini diwarnai dengan adanya keterbukaan dari pemerintah tidak membuat organisasi masyarakat lebih mudah untuk mencapai misinya. Lingkungan yang kompetitif serta berbagai perkembangan baik teknologi, pengetahuan dan kebijakan, menjadikan pengelolaan di organisasi masyarakat juga semakin kompleks. Bertambahnya jumlah organisasi masyarakat juga meningkatkan persaingan dalam memperoleh sumber daya seperti donatur, subsidi pemerintah, kerjasama dan juga mendapatkan sumber daya manusia. Di era paska reformasi ini organisasi masyarakat tetap dituntut untuk dapat beradaptasi agar dapat berkelanjutan dalam menjalankan misinya. Berbagai perkembangan seperti globalisasi dan perkembangan teknologi di satu sisi menciptakan ruang baru untuk pertumbuhan organisasi masyarakat namun sekaligus memberi tekanan bagi manajemen dan kompetensi sumber daya manusia di organisasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan perkembangan tersebut bagi kelangsungan organisasi (Nugroho, 2010, 2011, 2012). Berbagai kebijakan global di bidang lingkungan, hak asasi, kesetaraan dan isu lainnya, menuntut organisasi masyarakat untuk mampu merumuskan berbagai isu global tersebut dalam konteks dan implementasi di ranah lokal (Nugroho, 2011; Palmer, 2014). Selain itu perkembangan teknologi juga menuntut pengelolaan organisasi serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadikan teknologi sebagai instrumen dalam mencapai tujuan organisasi (Nugroho, 2010, 2011, 2012). Era ini juga menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi organisasi masyarakat untuk berjejaring dan melakukan kolaborasi yang inovatif dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah dan organisasi bisnis (Lay, 2017; Yumasdaleni & Jakimow, 2017). Organisasi masyarakat pada saat ini ditantang untuk dapat menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang dalam berkolaborasi, berjejaring dan berinovasi agar dapat berkelanjutan dalam menjalankan misinya.

Pada sisi lain pertumbuhan jumlah organisasi masyarakat masih belum dibarengi dengan perkembangan manajemen internal organisasi dan pembentukan koordinasi atau jaringan organisasi masyarakat di Indonesia (Antlöv et al., 2006; Eldridge, 2005; Fakhri, 1991b; Riker, 1999). Beberapa peneliti mengindikasikan keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia sangat sektoral, hal ini disebabkan tidak adanya organisasi induk yang memayungi berbagai organisasi masyarakat di Indonesia (Antlöv, Brinkerhoff, & Rapp, 2008; Antlöv et al., 2010; Pratono & Sutanti, 2016). Selain itu, berbagai asosiasi atau perhimpunan organisasi yang membangun jaringan bersama memiliki jumlah anggota organisasi yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah

organisasi dengan misi yang sama di Indonesia (Antlöv et al., 2006; Riker, 1999; Rostiani et al., 2014; Sinaga, 1993). Penyebaran organisasi masyarakat di Indonesia masih lebih terpusat di kota-kota besar di Indonesia, sedang jumlah organisasi masyarakat di luar Jawa masih terbilang kecil (Antlöv et al., 2006; Eldridge, 2005; Fakih, 1991; Riker, 1999). Beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa organisasi masyarakat sulit dalam mendapatkan pegawai baru, dikarenakan rendahnya citra publik untuk bekerja di organisasi masyarakat dibanding bekerja pada institusi pemerintah atau perusahaan bisnis (Sinaga, 1993). Karenanya organisasi masyarakat sangat bergantung pada jaringan sosial dalam beberapa aktivitas seperti merekrut pegawai, mensosialisasikan program kegiatan serta menemukan donatur (Rostiani et al., 2014). Hal ini menunjukkan manajemen internal organisasi di organisasi masyarakat belum mengalami perkembangan yang signifikan dan memerlukan perhatian peneliti dalam memberikan kontribusi penelitian serta pengetahuan bagi pengembangan manajemen organisasi di sektor ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian di atas telah menunjukkan perkembangan organisasi masyarakat dari berbagai periode berbeda. Perubahan kebijakan dan konteks politik yang terjadi di berbagai periode turut membentuk perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia. Setiap era memiliki tantangan yang khas dan menuntut penanganan yang berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu: pertama, organisasi masyarakat di Indonesia telah menjadi perintis dan juga pengawal dalam menjaga keberlangsungan berbagai pergerakan dan pencapaian misi seperti kedaulatan rakyat dan memajukan kesejahteraan sosial yang telah diperjuangkan sejak awal kemunculan organisasi masyarakat di era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kedua, organisasi masyarakat dituntut untuk responsif terhadap perubahan kondisi serta tantangan yang dapat berubah seiring waktu dan membutuhkan kemampuan adaptasi serta inovasi untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Ketiga, organisasi masyarakat saat ini dituntut responsif terhadap berbagai perkembangan kebijakan global dan mampu merumuskannya dalam rangka menjawab kebutuhan di ranah lokal. Organisasi masyarakat saat ini juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan itu bagi kemajuan pencapaian misi organisasi. Keempat, organisasi masyarakat saat ini berada di era keterbukaan yang membuka peluang untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan organisasi bisnis, hal yang sulit dilakukan dalam periode sebelumnya. Ini merupakan peluang bagi organisasi masyarakat untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misinya. Kelima, jika melihat pada perkembangan pesat

organisasi masyarakat baik dalam jumlah maupun ukuran organisasi, namun masih sedikitnya perhatian peneliti manajemen di organisasi masyarakat. Hal ini dapat menjadikan organisasi masyarakat sebagai ranah baru dalam penelitian manajemen terutama pada organisasi masyarakat yang telah berkembang cukup pesat seperti berbagai Yayasan di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian terhadap sektor ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan internal organisasi terutama di beberapa bidang seperti sumber daya manusia, manajemen keuangan atau manajemen strategik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., & Nurmayanti, E. (2016). *Cooperatives in Indonesia: Recent Conditions and Challenges*.
- Anheier, H. K. (2014). *Nonprofit Organizations : Theory, Management, Policy* (Vol. Second edition). Abingdon, Oxon: Routledge.
- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2008). *Civil society organizations and democratic reform: Progress, capacities, and challenges in Indonesia*. Paper presented at the RTI International, Paper presented at the 37th Annual Conference, Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, Philadelphia.
- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 21(3), 417-439.
- Antlöv, H., Ibrahim, R., & van Tuijl, P. (2006). NGO governance and accountability in Indonesia: Challenges in a newly democratizing country. *NGO accountability: Politics, principles and innovations*, 147-163.
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319.
- Candland, C. (2000). Faith as social capital: Religion and community development in Southern Asia. *Policy Sciences*, 33(3-4), 355-374.
- Clarke, G. (1998). Non-governmental organizations (NGOs) and politics in the developing world. *Political studies*, 46(1), 36-52.

- Eldridge, P. (1989). NGOs in Indonesia: popular movement or arm of government? *Working Papers (Monash University. Centre of Southeast Asian Studies)*, viii.
- Eldridge, P. (2005). Nongovernmental organizations and democratic transition in Indonesia. *Civil Life, Globalization, and Political Change in Asia: Organizing Between Family and State*, 148-170.
- Fakih, M. (1991b). NGOs in Indonesia. *Occasional Paper Series on Non-Governmental Organizations*, 2, 13.
- Gayo, S. (2012). *Mandatory and voluntary corporate social responsibility policy debates in Indonesia*. Paper presented at the International Conference on International Relations Development.
- Hadiwinata, B. S. (2003). *The politics of NGOs in Indonesia: Developing democracy and managing a movement*: Routledge.
- Idris, A., & Hati, R. H. (2013). Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship*, 4(3), 277.
- Indonesia, M. o. H. A. R. o. (2016). Mendagri: Saat Ini Ada 254.633 Ormas. Retrieved from <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/06/mendagri-saat-ini-ada-254633-ormas>
- Kenny, S. (2013b). Challenging third sector concepts. *Third Sector Review*, 19(1), 171-188.
- Kobayashi, H. (2011). *Civic Associations, Local Governance and Conflict Prevention in Indonesia*. University of Southern California.
- Lay, C. (2017). Political linkages between CSOs and parliament in Indonesia: a case study of political linkages in drafting the Aceh Governance Law. *Asian Journal of Political Science*, 25(1), 130-150.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-governmental organizations and development*: Routledge.
- Lynn, D. B. (2003). Symposium: Human resource management in nonprofit organizations. *Review of Public Personnel Administration*, 23(2), 91-96.
- Nugroho, Y. (2010). NGOs, the Internet and sustainable rural development: The case of Indonesia. *Information, Communication & Society*, 13(1), 88-120.
- Nugroho, Y. (2011). Opening the black box: The adoption of innovations in the voluntary sector—The case of Indonesian civil society organisations. *Research Policy*, 40(5), 761-777.
- Nugroho, Y. (2012). Localising the global, globalising the local: The role of the Internet in shaping globalisation discourse in Indonesian NGOs. *Journal of international Development*, 24(3), 341-368.
- Palmer, C. (2014). Making a difference? Accounting for nongovernmental organizations in the comanagement of Lore Lindu national park, Indonesia. *The Journal of Environment & Development*, 23(4), 417-445.
- Pratono, A. H., & Sutanti, A. (2016). The ecosystem of social enterprise: Social culture, legal framework, and policy review in Indonesia. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(3), 106-112. doi:10.1016/j.psr.2016.09.020
- Riker, J. V. (1999). The state, institutional pluralism, and development from below: The changing political parameters of state-NGO relations in Indonesia.
- Rostiani, R., Paramita, W., Audita, H., Virgosita, R., Budiarto, T., & Purnomo, B. R. (2014). Understanding social enterprises in Indonesia: drivers and challenges. *Journal of Indonesian Economy and Business : JIEB*, 29(2), 183.
- Sakai, Y. (2002). Flexible NGOs vs Inconsistent State Control. *The State and NGOs: Perspective from Asia*(25), 161.
- Salamon, L. M. (1994). The rise of the nonprofit sector. *Foreign Affairs*, 109-122.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1992). In search of the non-profit sector. I: The question of definitions. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 3(2), 125-151.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1998). Social origins of civil society: Explaining the nonprofit sector cross-nationally. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 9(3), 213-248.
- Salamon, L. M., & Sokolowski, S. W. (2016). Beyond nonprofits: Re-conceptualizing the third

- sector. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(4), 1515-1545.
- Schweizer, R., Dupuis, J., & De Buren, G. (2016). Environmental innovation strategies: When and why NGOs go beyond public regulations. *Environmental Politics*, 25(5), 899-920.
- Sinaga, K. (1993). Neither merchant nor prince: a study of NGOs in Indonesia. *Sociological bulletin*, 42(1-2), 137-156.
- Yumasdaleni, & Jakimow, T. (2017). NGOs, 'Straddler' Organisations and the Possibilities of 'Channelling' in Indonesia: New Possibilities for State-NGO Collaboration? *Voluntas*, 28(3), 1015-1034. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s11266-016-9719-y>